KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gunakan pupuk, petani harus terus diedukasi
Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Gunakan Pupuk

Petani Harus Terus Diedukasi

ANGGOTA Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6 persen dari total alokasi 9,55 juta ton. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar belum menebus pupuk subsidi, padahal produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Rendahnya serapan pupuk subsidi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi yang ada. Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari solusi yang tepat agar pupuk subsidi dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran," ujarnya.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran pupuk subsidi. Penggunaan teknologi dan data digital dalam proses distribusi dapat membantu memonitor penyaluran pupuk secara *real-time* dan mencegah penyalahgunaan. "Pemerintah harus memastikan bahwa data petani yang berhak menerima pupuk subsidi akurat dan mutakhir," tegas Andi Akmal.

Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki koordinasi antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar.

Selain itu menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pupuk subsidi. "Tindakan tegas terhadap oknum yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi sangat diperlukan. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas program subsidi pupuk," kata Andi Akmal.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada petani mengenai cara penggunaan pupuk yang tepat agar hasil produksi dapat optimal. "Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi dalam jangka panjang," jelasnya.

Andi Akmal mengingatkan, ketidakpastian dalam penyaluran pupuk subsidi dapat berdampak negatif pada produksi pangan nasional. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat merugikan, baik bagi petani maupun bagi ketahanan pangan nasional. "Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan sesuai rencana," ujarnya.

Dia menegaskan, Komisi IV DPR akan terus memantau perkembangan penyaluran pupuk subsidi dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna mencari solusi terbaik. "Mesti diawasi setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif untuk kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional," pungkasnya. ■ KAL